

EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA (Studi Kasus: Desa Korobonde, Korowou, Wawopada)

Yemim Krenhazia, Amar Ali, Yunus Sading

Yemimkrenhaziasondi@gmail.com

Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Perdesaan Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Rural Infrastructure Development Program (PIIP) is a program of rural infrastructure development assistance directed to boost the rural economy. PIIP implemented participation where the public can choose the desired infrastructure. With a participatory approach, the infrastructure priorities depend on society's ability to vote. This study aimed to evaluate the results of the implementation of the PIIP using evaluation criteria Dunn effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness and also to see the benefits of the program on improving the local economy by taking a case study in the village Korobonde, Korowou and Wawopada District of Lembo. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques using Likert Scale. Results showed that the Rural Infrastructure Development program has been able to increase public access, yet the program has not been able to increase the welfare of the poor.

Keywords: *Program, Rural Infrastructure, Evaluation, Economic Improvement Society*

Peranan infrastruktur adalah sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sistem sosial didalam tatanan kehidupan manusia dengan lingkungan alam menjadi penting. Infrastruktur yang kurang atau bahkan tidak berfungsi akan memberikan dampak yang besar bagi manusia (Kodoatie, 2003). Hal tersebut berarti bahwa keberadaan sistem infrastruktur mutlak dibutuhkan didalam berbagai jenis kegiatan. Ketersediaan infrastruktur juga sangat menentukan tingkat keefisienan dan keefektifan kegiatan ekonomi serta merupakan prasyarat agar roda perekonomian berjalan dengan baik. (Todaro, 2000).

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan atau yang lebih dikenal sebagai PIIP, dicanangkan oleh Pemerintah melalui Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2007. PIIP merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan. Pelaksanaan PIIP berbasis pada

pemberdayaan masyarakat yang dalam kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan identifikasi permasalahan ketersediaan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang akan dibangun bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih infrastruktur yang tepat, dengan mempertimbangkan bahwa masing-masing karakteristik infrastruktur memberikan dampak berbeda terhadap kawasan yang dibangun. PIIP dilaksanakan dengan menggunakan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), merupakan dana stimulan sebesar Rp 250 juta, untuk membiayai upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi kawasan (Kementrian Pekerjaan Umum, 2013).

Kecamatan Lembo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Morowali Utara yang mendapatkan bantuan PIIP tahun 2013 dan

2014, dengan desa sasaran yaitu Desa Korobonde, Desa Korowou, dan Desa Wawopada, dimana desa tersebut merupakan kawasan perdesaan berbasis pertanian yang masuk kategori desa tertinggal dan sedang berkembang. Jenis kegiatan PPIP di desa tersebut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 meliputi pembangunan prasarana dasar lingkungan tempat tinggal masyarakat berupa peningkatan jalan lingkungan dalam desa atau perkampungan. Dari Data Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima Raskin per desa di Kecamatan Lembo, diketahui penduduk miskin Desa Wawopada tahun 2011 dan 2012 berjumlah 32 KK atau 20,13 %, Desa Korobonde berjumlah 28 KK atau 17,61 % dan Desa Korowou berjumlah 99 KK atau 62,26 %, pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 jumlah keluarga miskin pada masing-masing desa menjadi bertambah dimana Desa Wawopada menjadi 45 KK atau 23,20 %, Desa Korobonde 32 KK atau 16,50 % dan Desa Korowou menjadi 117 KK atau 60,30%, dimana rata-rata mata pencaharian keluarga miskin tersebut adalah sebagai petani, buruh tani, tukang kayu, tukang jahit dan pemulung dengan rata-rata pendapatan per bulan antara Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan strategis dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan khususnya masyarakat miskin melalui PPIP, dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada evaluasi program untuk mengungkapkan hasil dan manfaat adanya PPIP di Kecamatan Lembo. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini

yang menjadi tolak ukur dalam menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan publik menggunakan teori evaluasi Dunn (2003 yang terdiri dari beberapa kriteria yaitu, efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), ketepatan (*appropriateness*). Yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2013-2014 terhadap peningkatan perekonomian masyarakat miskin Desa Korobonde, Korowou, dan Desa Wawopada di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara adapun tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2013-2014 terhadap peningkatan perekonomian masyarakat miskin Desa, Korobonde, Korowou, dan Desa Wawopada di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif untuk menjelaskan gambaran yang nyata tentang evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada desa sasaran program yaitu desa Korobonde, Korowou dan desa Wawopada tahun 2013 dan tahun 2014 di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus (*case studies*), menurut Creswell (2009) dalam Sugiyono (2014:15), studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Untuk Penelitian ini peneliti menggunakan teknik sampling *Nonprobability*

Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik sampel dalam *Nonprobability Sampling* yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau sebagai penguasa yang dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2014:301). Berdasarkan kriteria tersebut maka responden dalam penelitian ini berjumlah 107 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, kuesioner, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah penulis sendiri. Menurut Sugiyono (2014:305) peneliti kualitatif adalah sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Sebagai alat ukur selain dari pedoman wawancara, dalam penelitian ini adalah kuesioner yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data masukan yang lebih banyak dari masyarakat.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis tidak menggunakan uji statistik, melainkan analisa non statistik. Kalaupun terdapat data bersifat kuantitatif, dianalisa melalui teknik analisa kualitatif. Menurut Sugiyono (2009) *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Pemberian predikat pada setiap variabel diukur dengan persentase, kemudian ditransfer

kedalam kata-kata atau kalimat yang sebenarnya, dipisah-pisahkan menurut standar dan kategori tertentu. Adapun untuk menentukan persentase atau tanggapan responden yang kemudian akan dijadikan dasar penentuan posisi kriteria interpestasi nilai suatu pertanyaan berdasarkan frekuensi (jumlah responden) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

Keterangan:
 P (persentase),
 F (frekuensi),
 N (jumlah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Letak geografis Kecamatan Lembo

Kecamatan Lembo memiliki 14 desa dengan Desa Beteleme sebagai ibu kota kecamatan. Luas wilayah Kecamatan Lembo yaitu 975, 23 Km². Sebagai Desa sasaran Program PPIP tahun 2013 dan Tahun 2014 di wilayah Kecamatan Lembo diketahui Desa Wawopada memiliki wilayah terluas yaitu 143,02 Km² atau 21,18% dari luas Kecamatan Lembo, Desa Korowou yaitu 99,61 Km² atau 14,75% dan Desa Korobonde memiliki luas paling terkecil sebesar 10,04 Km² atau 1,49% dari luas Kecamatan Lembo.

Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan yaitu Desa Korobonde berjumlah 1306 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 365 KK, Desa Korowou penduduknya berjumlah 1961 jiwa dengan 541 KK, dan Desa Wawopada jumlah penduduk sebesar 1007 jiwa dengan 292 KK.

Kondisi Ekonomi Desa

Desa Korobonde

Mata pencaharian penduduk desa sangat dominan petani, kemudian buruh tani, pedagang dan lain-lain, termasuk di dalamnya adalah mata pencaharian penduduk miskin untuk desa Korobonde penduduk miskin yang memiliki mata pencaharian sebagai petani sebanyak 10 orang dari total 560 orang, dan sebagai buruh tani sebanyak 22 orang dari 148 orang.

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Keterangan Jumlah KK Miskin (Orang)
1	Petani	560	10
2	Pedagang	5	
3	Buruh tani	148	22
4	Pengrajin	8	
5	Montir	3	
6	PNS	17	
			32

Desa Wawopada

Untuk desa Korowou jumlah penduduk miskin sebagai petani berjumlah 54 orang dari jumlah 334 orang, sebagai buruh tani 62 orang dari 75 orang dan sebagai tukang kayu 1 orang dari jumlah total 12 orang.

Tabel 2. Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jml (Org)	Keterangan Jumlah KK Miskin (orang)
1	Petani	295	18
2	Pedagang	10	
3	Buruh tani	25	25
4	Pertukangan	3	
5	Sopir	3	
6	Karyawan Swasta	47	
7	PNS	42	
8	Tukang jahit	1	1
9	Pemulung	1	1
			45

Sumber: RPJMDES, Desa Wawopada

Desa Korowou

Untuk desa Korowou jumlah penduduk miskin sebagai petani berjumlah 54 orang dari jumlah 334 orang, sebagai buruh tani 62 orang dari 75 orang dan sebagai tukang kayu 1 orang dari jumlah total 12 orang.

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Keterangan Jumlah KK Miskin (Orang)
1	Petani	334	54
2	Pedagang	7	
3	Buruh tani	75	62
4	Pertukangan	12	1
5	Peternak	2	
6	Guru	26	
7	PNS	9	
			117

Sumber: RPJMDES, Desa Korowou

Perencanaan Infrastruktur Desa

Unsur geografis desa yaitu lokasi, tanah, dan iklim semuanya berperan penting tetapi unsur lokasi yang paling menentukan dalam perkembangan wilayah pedesaan, karena berhubungan dengan letak fisik suatu wilayah, sehingga berpengaruh terhadap kebutuhan infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur dalam pengembangannya didasarkan pada masalah dan potensi yang ada di desa.

Penyelenggaraan PPIP Tahun 2013 dan Tahun 2014 di Kabupaten Morowali Utara

Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan PPIP tahun 2013 di Kabupaten Morowali Berdasarkan pada SK Menteri PU Nomor 179/KPTS/M/2013 berada di 15 kecamatan dan 48 desa termasuk di dalamnya adalah Kecamatan Lembo dengan 2 (dua) desa sasaran yaitu Desa Korobonde dan Desa Wawopada. Sedangkan Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan PPIP tahun 2014 di Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan pada SK Menteri PU Nomor 386/KPTS/M/2014 berada pada 6 kecamatan terdiri dari 8 desa sasaran program, termasuk di dalamnya adalah Kecamatan

Lembo dengan desa sasaran program yaitu Desa Korowou. Penetapan desa-desa tersebut didasarkan pada kriteria:

- 1) Desa-desa yang dipilih memiliki kriteria minimnya prasarana produksi yang berakibat tingginya beban sosial ekonomi masyarakat.
- 2) Rendah kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, dan
- 3) Terisolasi warga masyarakat desa menuju pusat-pusat pemasaran yang terletak sekitar 6-10 Km (terutama pusat kecamatan) dengan kondisi jalan tanah yang memprihatinkan,
- 4) Bahwa lokasi yang ditetapkan adalah kawasan diperdesaan dalam kategori miskin dan tertinggal (status tertinggal disini masih mengacu pada pertumbuhan penduduk miskin di kawasan tersebut),
- 5) Penduduk pada kawasan tersebut mempunyai tingkat kesehatan yang rendah dan tingkat kesejahteraan tergolong keluarga prasejahtera.

Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2013 Di Kecamatan Lembo

Desa Korobonde

Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Korobonde dilakukan secara kontraktual yaitu pembangunan prasarana penunjang jalan berupa drainase (saluran/parit tepi jalan) volume 398,21 M dengan biaya Rp 186.480.000, pembuatan 6 unit plat duicker, 5 unit dengan biaya Rp 52.181.000 dan 1 unit biaya Rp 6.339.000. Jumlah pemanfaat 35 KK. Lokasi pembangunan drainase dan plat Duicker berada pada Dusun III, lokasi tersebut adalah jalan lingkungan sebagai tempat permukiman warga yang terdiri dari 13 unit rumah yang di huni oleh 13 KK.

Desa Wawopada

Pelaksanaan kegiatan PPIP di desa Wawopada adalah pembangunan prasarana jalan berupa penghamparan sirtu (perkerasan sirtu) volume 113 M dengan biaya Rp 29.124.000, pembangunan penunjang prasarana

jalan berupa drainase volume 402 M dengan biaya Rp 188.579.000, dan pembuatan 3 unit plat Duicker, 2 unit dengan biaya 19.756.000 dan 1 unit dengan biaya 7.541.000. Lokasi pembangunan di dusun IV, yang merupakan jalan lingkungan tempat permukiman masyarakat terdiri dari 24 unit rumah yang ditinggali oleh 24 KK termasuk di dalamnya 2 KK yang merupakan keluarga miskin, dan juga lokasi tersebut merupakan akses masyarakat ke lahan pertanian (kebun karet dan sawah). Masyarakat yang memiliki lahan pertanian pada lokasi tersebut ada 3 KK dan bukan merupakan warga dusun IV. Kondisi jalan pada lokasi pembangunan di Dusun IV pada awalnya adalah jalan tanah dan rusak sehingga jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan, apabila intensitas hujan cukup tinggi sering terkena banjir karena belum ada saluran air. Setelah ada peningkatan jalan dengan penghamparan sirtu pembuatan drainase dan plat Duicker maka jalan menjadi lebih baik dan sudah bisa dilewati oleh kendaraan motor maupun mobil sehingga aktivitas masyarakat setempat sudah menjadi lebih mudah.

Hasil Pelaksanaan PPIP Tahun 2014 Di Kecamatan Lembo

Pelaksanaan kegiatan PPIP di desa Korowou adalah pembangunan prasarana jalan berupa jalan rabat beton volume 250 M, biaya Rp 57.355.156, penghamparan sirtu volume 356 M, biaya 24.084.682, pondasi jalan volume 600 M biaya Rp 11.654.849. Lokasi pembangunan jalan merupakan jalan lingkaran desa atau sering disebut masyarakat jalan lingkaran Bumi Tomorinda. Jalan tersebut merupakan jalan alternatif menuju poros jalan ke Ibukota Kabupaten. Jalan tersebut pada awalnya dibangun oleh pihak swasta karena tidak ada lagi pemeliharaan jalan maka jalan tersebut menjadi rusak dan tidak lagi dilalui masyarakat. Dengan adanya PPIP maka jalan tersebut dikerjakan kembali untuk lebih mempercepat akses masyarakat menuju poros jalan kabupaten dengan perbedaan jarak jika melewati jalan desa dan jalan lingkaran ± 5 Km.

Pemanfaat jalan yaitu mereka yang memiliki kendaraan motor maupun mobil dengan jumlah 45 KK.

Karakteristik Responden

Jumlah Responden Menurut Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Umur dibedakan menjadi dua yaitu usia produktif dan usia non produktif. Klasifikasi umur yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Responden Menurut Umur

No	Umur (tahun)	Jumlah (orang)	%
1	25 - 29	-	
2	30 - 34	13	12
3	35 - 39	18	17
4	40 - 45	27	25
5	46 - 50	34	32
6	51 - 55	15	14
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Jumlah Responden Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki sangat berpengaruh pada kualitas kerja seseorang dalam mengelola usahanya. Adapun tingkat pendidikan responden adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Responden Menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1	SD	35	33
2	SMP	42	39
3	SMA	28	26
4	D2	1	1
5	SI	1	1
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Responden Menurut Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Jumlah responden menurut tingkat pendapatan sebagai berikut:

Tabel 6. Responden Menurut Tingkat Pendapatan

Klaster Pendapatan (RP)	Jenis Pekerjaan					JML	%
	Tani	Buruh Tani	PNS	Tukang	Swasta		
500.000 – 1.000.000	35	29	-	2	-	66	62
1.500.000 – 3.000.000	19	14	2	-	-	35	32
3.500.000 – 4.000.000	-	-	-	-	6	6	6
> 5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Total	54	43	2	2	6	107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Pembahasan

Manfaat Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan peningkatan infrastruktur melalui PPIP dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diharapkan bahwa setiap infrastruktur yang terbangun baik prasarana jalan (perkerasan sirtu, rabat beton)

dan prasarana penunjang jalan (drainase, plat duicker) memiliki manfaat secara ekonomi terhadap masyarakat.

Dalam pembahasan ini akan dilihat manfaat infrastruktur pada aktivitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan dalam pendapatan masyarakat karena pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, dengan demikian

pengembangan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur perdesaan diharapkan bahwa setiap individu dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam hal ini adalah peningkatan hasil produksi yang dapat menguntungkan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan untuk memperbaiki

kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang manfaat ekonomi dari pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan hasil produksi yaitu hasil pertanian, peternakan, ataupun jenis usaha lainnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Infrastruktur Terhadap Peningkatan Hasil Produksi

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Berpengaruh	-	-
2	Berpengaruh	-	-
3	Kurang Berpengaruh	39	36
4	Tidak Berpengaruh	68	64
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2016

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan 36% atau 39 responden yang menyatakan bahwa pengaruh infrastruktur terhadap peningkatan produksi pertanian/peternakan, serta jenis usaha lainnya kurang berpengaruh.

Selanjutnya sebanyak 64% atau 68 responden yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh infrastruktur yang dibangun terhadap peningkatan hasil produksi.

Tabel 8. Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Hasil Produksi Terhadap Pendapatan Masyarakat

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat berpengaruh	-	-
2	Berpengaruh	-	-
3	Kurang berpengaruh	39	36
4	Tidak Berpengaruh	68	64
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil olahan Data Primer, 2016

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 36% atau 39 responden yang menyatakan bahwa hasil produksi kurang berpengaruh terhadap pendapatan mereka dan 64% atau 68 responden yang menjawab tidak ada pengaruh hasil produksi terhadap pendapatan mereka.

Dari pembahasan tersebut, apabila dilihat dari segi manfaat ekonomi dapat disimpulkan bahwa pengaruh infrastruktur yang dibangun terhadap peningkatan ekonomi belum tercapai.

Adapun manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat infrastruktur yang dibangun hanyalah merupakan kemudahan, aksesibilitas mereka pada penggunaan jalan dalam melakukan kegiatan sosial, belum ada manfaat yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka. Hal ini disebabkan oleh karena ketidak tepatan dalam memilih lokasi pembangunan infrastruktur. Pembangunan prasarana jalan (perkerasan sirtu, rabat beton) dan prasarana penunjang jalan (drainase, plat

Duicker) merupakan jalan lingkungan jadi manfaat yang dirasakan adalah manfaat sosial saja, tidak berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena pembangunan infrastruktur yang dilakukan bukan peningkatan jalan kantong produksi.

Evaluasi PPIP Di Kecamatan Lembo

Efektivitas

Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap

efektivitas di ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu dalam pencapaian hasil/tujuan kebijakan dari PPIP di Desa Korobonde, Korowou dan Desa Wawopada. Waktu yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPIP berdasarkan ketentuan dalam pedoman pelaksanaan PPIP tahun 2013 dan 2014 adalah 82 hari kerja terhitung dari 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Berikut adalah tanggapan responden berkaitan dengan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan PPIP:

Tabel 9. Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Waktu Pelaksanaan PPIP Dalam Mencapai Hasil

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	62	58
3	Kurang sesuai		
4	Tidak sesuai	45	42
	Jumlah	107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Data tersebut diatas menggambarkan hasil tanggapan dari 107 responden masyarakat penerima manfaat program pada 3 desa sasaran PPIP (Desa Korobonde, Wawopada, Korowou) di Kecamatan Lembo dimana sebanyak 62 orang atau 58% menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, dan 45 orang atau 42% menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan PPIP sudah berjalan efektif dari segi waktu pelaksanaannya pada dua desa yaitu Korobonde dan Wawopada dan Desa Korowou belum efektif.

Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kebijakan yang dijalankan. Penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil maksimal. Penelitian ini melihat efisiensi dari seberapa banyak usaha dalam hal ini dilihat dari penggunaan dana BLM sebesar Rp 250 juta untuk mencapai hasil yang diinginkan dari penerapan PPIP. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dari tanggapan Responden tentang penggunaan dana PPIP terhadap hasil pembangunan Infrastruktur.

Tabel 10. Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Penggunaan Dana PPIP Terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat sesuai	12	11,2
2	Sesuai	31	29
3	Kurang sesuai	57	53,3
4	Tidak sesuai	7	6,5
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Hasil olahan data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah yang menjawab kurang sesuai dengan 57 responden atau sebesar 53,3%, selanjutnya yang menjawab cukup sesuai 31 responden atau 29%, yang menjawab sesuai 12 responden atau 11,2% dan tidak sesuai sebanyak 7 responden atau 6,5%.

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dilakukan secara keseluruhan terkait dengan efisien, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi besaran dana dalam pelaksanaan program belum menunjukkan tingkat efisiensi, karena apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dengan hasil yang dicapai, ini berarti kegiatan kebijakan tidak efisien, dimana dengan keberadaan dana yang cukup besar belum menampilkan hasil yang maksimal dari hasil pelaksanaan PPIP seperti pembangunan infrastruktur jalan, dan infrastruktur penunjang jalan sebagaimana yang tertuang dalam program. Ketidak efisienan penggunaan dana ini disebabkan oleh karena pelaksanaan program ini dilakukan oleh pihak ketiga (dikontraktualkan), sehingga kemungkinan terjadi penyalahgunaan dana BLM. Kegiatan pembangunan infrastruktur seharusnya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara swakelola, tidak dikontraktualkan.

Kecukupan

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Penelitian ini menekankan kecukupan pada seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan terkait ketepatan memecahkan masalah dalam penerapan PPIP di Desa Korobonde, Wawopada dan Desa Korowou. Kegiatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini harus ada keterpaduan program pembangunan, artinya program infrastruktur yang direncanakan dan dilaksanakan dapat bersinergi dengan program pembangunan perdesaan lainnya sehingga program PPIP yang dilaksanakan dapat memecahkan masalah kemiskinan yang ada di desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat terlebih khusus yang menyangkut kebutuhan masyarakat miskin pada desa sasaran program. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap kesesuaian program PPIP dengan Masalah kebutuhan infrastruktur di desa pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Tanggapan Responden Tentang Kesesuaian Program Dengan Masalah Kebutuhan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Di Desa

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	10	9,3
2	Sesuai	22	20,6
3	Kurang sesuai	52	48,6
4	Tidak sesuai	23	21,5
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden yaitu 52 responden atau 48,6% menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun melalui PPIP kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terlebih khusus masyarakat miskin, sebanyak 10 responden atau 9,3% yang menyatakan

bahwa pembangunan itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena memang lokasi pembangunan itu ada di dalam desa dan kondisinya rusak, selanjutnya ada 20 atau 20,6% responden yang memilih bahwa pembangunan infrastruktur itu telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena mereka merasakan sendiri manfaat dari adanya infrastruktur terbangun. Dilain pihak ada sekitar 23 atau 21,5% responden yang menilai bahwa infrastruktur yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat yang utama, karena dari usulan-usulan program sebenarnya banyak yang lebih prioritas termasuk di dalamnya adalah peningkatan jalan tani dimana menurut mereka jalan tani tersebut banyak masyarakat yang menggunakan termasuk di dalamnya masyarakat miskin.

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa infrastruktur yang dibangun melalui PPIP belum sepenuhnya dapat memecahkan masalah kebutuhan masyarakat akan infrastruktur terlebih khusus bagi masyarakat miskin. Walaupun ada sebagian masyarakat yang merasakan manfaat dibangunnya infrastruktur tersebut akan tetapi itu hanya sepihak saja, sebagaimana diketahui bahwa sasaran PPIP adalah masyarakat miskin dalam hal ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui pembangunan infrastruktur.

Perataan

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan atau usaha secara adil didistribusikan. Perataan pada penelitian ini dilihat dari biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda dalam pelaksanaan PPIP di Desa Korobonde, Wawopada dan Desa Korowou. Berikut adalah tanggapan responden tentang pemerataan hasil pelaksanaan PPIP pada seluruh masyarakat:

Tabel 12. Tanggapan Responden Tentang Pemerataan Hasil Pelaksanaan PPIP

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat merata	-	-
2	Merata	18	17
3	Kurang merata	32	30
4	Tidak merata	57	53
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa 17% atau 18 responden menyatakan bahwa hasil pelaksanaan PPIP sudah merata kepada semua masyarakat. Selanjutnya 30% atau 32 responden menyatakan bahwa hasil pelaksanaan PPIP kurang merata pada semua masyarakat, responden terbanyak adalah 53% atau 57 responden menyatakan hasil pelaksanaan PPIP tidak merata pada seluruh masyarakat.

Dari tanggapan masyarakat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan PPIP, manfaatnya tidak merata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan program tersebut dianggap memiliki tujuan tersendiri dari pelaksana, seperti kepentingan sehingga manfaatnya tidak merata pada semua masyarakat. Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil dari pelaksanaan PPIP sebagaimana tujuan program adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Responsivitas

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Penelitian ini akan melihat responsivitas dari hasil kebijakan PPIP

memuaskan prefensi atau nilai kelompok tertentu yaitu masyarakat miskin sebagai sasaran dalam pelaksanaan program, karena PPIP merupakan program dalam rangka penanggulangan kemiskinan di desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur, dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut adalah tanggapan responden tentang kepuasan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan PPIP.

Tabel 13. Tanggapan Responden Tentang Kepuasan Masyarakat Terhadap Hasil Pelaksanaan PPIP

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat memuaskan	-	-
2	Memuaskan	39	36
3	Kurang memuaskan	-	-
4	Tidak memuaskan	68	64
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, tahun 2016

Berdasarkan dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang hasil pelaksanaan PPIP terhadap kepuasan masyarakat akan manfaat yang dirasakan dalam hal ini adalah masyarakat miskin sebagai sasaran PPIP, responden yang menjawab sudah memuaskan 36% atau 39 responden adalah merupakan masyarakat pemanfaat, Dilain pihak 64% atau 68 responden menyatakan bahwa manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur tidak memuaskan bagi mereka adalah masyarakat miskin. Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan menggambarkan bahwa bahwa pelaksanaan program sudah memuaskan karena telah sesuai dengan keinginan masyarakat karena program tersebut dihasilkan dari aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa, sehingga hasil pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai penerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun. Akan tetapi dilain

pihak bahwa manfaat dari infrastruktur yang dibangun tidak memuaskan bagi kelompok masyarakat miskin yang sebenarnya menjadi sasaran dari pada PPIP. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPIP belum mencapai keberhasilan karena dilihat dari kriteria responsivitas suatu kebijakan dikatakan berhasil dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat sejauh mana kebijakan dapat memuaskan kelompok masyarakat yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan pada penelitian ini menekankan pada hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai sebagaimana yang dituangkan dalam program. Berikut tanggapan responden tentang ketepatan PPIP terhadap hasil (tujuan):

Tabel 14. Tanggapan Responden Tentang Ketepatan PPIP Terhadap Hasil (Tujuan) Program

No	Tanggapan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	Sangat Tepat	-	-
2	Tepat	18	17
3	Kurang Tepat	24	22
4	Tidak Tepat	65	61
Jumlah		107	100

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2016

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa 17% atau 18 responden menyatakan bahwa hasil dari PPIP sudah tepat karena sudah sesuai dengan kebutuhan mereka, dan yang mengatakan kurang tepat sebanyak 22% atau 24 responden mereka mengatakan kurang tepat karena mereka melihat dari hasil pembangunan infrastruktur walaupun sudah dapat memenuhi kebutuhan mereka akan tetapi hasilnya tidak maksimal jika dilihat dari segi penggunaan dana program. Sedangkan yang memilih

belum tepat sebanyak 61% atau 65 responden mereka adalah masyarakat miskin yang menjadi sasaran program sebenarnya tapi tidak merasakan manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur tersebut walaupun dalam beberapa usulan pada waktu penetapan lokasi dan jenis infrastruktur yang akan dibangun banyak memberikan usulan untuk meningkatkan jalan tani atau kantong-kantong produksi karena sebenarnya manfaatnya akan lebih besar dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa dengan dana BLM yang disalurkan melalui PPIP merupakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat desa sasaran program dipergunakan untuk membiayai upaya peningkatan kualitas dan akses pelayanan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi masyarakat. Melihat hasil uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan PPIP belum tepat sasaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil evaluasi disimpulkan bahwa pelaksanaan PPIP ini mampu meningkatkan akses masyarakat menuju fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur fisiknya. Namun, program ini belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perdesaan, dikarenakan penerima manfaat PPIP lebih di difokuskan pada masyarakat umum dan tidak tepat sasaran yaitu pada masyarakat miskin.

Rekomendasi

- 1) Kriteria desa sasaran penerima program sebaiknya perlu diperbaiki. Program diberikan pada desa yang didominasi oleh 25% penduduk miskin.
- 2) Searah dengan tujuan PPIP yaitu dalam meningkatkan infrastruktur dasar, hendaknya pemanfaatan prasarananya tidak hanya diarahkan pada tempat tinggal penduduk saja namun juga pada tempat kerja

khususnya pertanian dan perkebunan, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

- 3) Program tidak boleh dipolitisasi sehingga pelaksanaannya benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan dari kebijakan program tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kepada Bapak Dr. Amar Ali, S.T., M.T, selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Yunus Sading, S.E., M.Si., selaku pembimbing anggota, yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dikun, Suyono. 2003. *Infrastruktur Indonesia: Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Jakarta: Kementerian Negara PPN/BAPPENAS
- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Pedoman Pelaksanaan PPIP, Tahun 2011, 2013 dan tahun 2014
- Dunn, N William. 2000. *Pengantar Analisis kebijakan Publik*. Edisi Kedua: Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. 2003. *Pengantar Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Griig Ns. 1988. *Infrastructure Engineering and Management*. New York: John Wiley and Sons
- Kodoatie RJ. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka pelajar Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Prasetyo, R.B. 2008. *“Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kawasan Barat Indonesia*. Tesis Institut Pertanian Bogor.
- _____. 2013. *Cetakan Kelima, Statistika Untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta

_____. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi*.
Bandung: Alfabeta
Todaro M.P. dan S.C. Smith. 2006.
Pembangunan Ekonomi. Edisi ke
Sembilan. Jakarta: Erlangga.